

# Zulfadhli Bersedia Diperiksa



Zulfadhli.DOKUMEN

PONTIANAK. Mantan Ketua DPRD Kalbar yang juga anggota Komisi X DPR-RI, Ir H Zulfadhli menegaskan, siap diperiksa jika penyidik Polda ingin meminta keterangannya dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar senilai Rp 22,14 miliar.

"Saya siap diperiksa," kata Zulfadhli menjawab Equator saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) VII, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak, belum lama ini.

Hingga sekarang, kasus dana Bansos KONI masih belum beranjak dari Polda.

Korps baju cokelat tersebut juga belum meminta keterangan Zulfadhli dan mantan Gubernur Kalbar, Usman Jafar yang juga menjabat sebagai anggota DPR-RI. Polda beralasan belum mengantongi izin presiden untuk memeriksa keduanya.

"Saya siap kooperatif. Tak ada izin pun, saya siap diperiksa," lanjut Zulfadhli yang juga mantan Ketua DPD I Partai Golkar Kalbar tersebut.

Meski mengaku siap diperiksa, namun Zulfadhli tampaknya masih berharap prosedur pemeriksaannya dirinya sebagai wakil rakyat tetap harus dilaksanakan.

Artinya, Polda terlebih dahulu harus mengantongi izin dari presiden. "Kan seperti itu prosedurnya," pungkas Zulfadhli.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Minggu (26/6) mengatakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi dana Bansos masih terus berjalan. Hanya saja sedang menunggu surat izin Presiden untuk pemeriksaan dua saksi yang berstatus pejabat negara.

"Masih tetap jalan sambil menunggu surat izin presiden turun. Kita tidak bisa melampui batas. Kasusnya sudah

■ Halaman 7

Equator  
Senin, 27 Juni 2011

## Zulfadhli Bersedia

.... dari halaman 1

dilakukan gelar perkara di Mabes Polri," kata Mukson.

Menurutnya, Polda bakal segera memanggil saksi bila telah mengantongi surat izin Presiden. Selama surat izin itu belum turun, Polda tampaknya belum akan memanggil Zulfadhli maupun UJ.

Mukson menambahkan, pihaknya juga sempat menunggu turun izin Gubernur untuk memeriksa seorang saksi yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD. "Ketika telah mengantongi surat izin, pemeriksaan langsung dilakukan," katanya membandingkan.

Mencuatnya kasus korupsi Bansos Pemprop bermula dari hasil audit reguler yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuan-

gan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2006-2009. Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO).

Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah tersebut diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk kegiatan umum, Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya, dengan jumlah total mencapai Rp 55 miliar.

Khusus untuk Bansos yang merugikan negara lebih Rp 22,14 miliar, BPK sudah melakukan audit khusus. Dalam audit yang dikenal dengan sebutan

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) itu, BPK Perwakilan Kalbar juga menemukan unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Hasil PDTT itu diserahkan ke BPK Pusat untuk ditelaah.

Penelahaan dilakukan khusus untuk item anggaran yang terindikasi merugikan keuangan daerah. Di antaranya, dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp10,07 miliar.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368

miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar, serta ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Hasil pemeriksaan BPK Pusat sudah diserahkan ke BPK Perwakilan Kalbar untuk dibuatkan resume. Selanjutnya, resume tersebut sudah diserahkan kembali oleh BPK Perwakilan Kalbar ke BPK Pusat untuk dilakukan pengkajian akhir sebelum diserahkan ke aparat hukum, yakni KPK yang pada akhirnya didelegasikan untuk diproses oleh Polda Kalbar. (bdu)